

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU.

Sri Mamudji dan Soerjono Soekanto, 2014, *Penelitian Hukum Normatif* , Jakarta Radja Grafindo Persada

Dr.Maruarar Siahaan,S.H.,2015,Hukum Acara Mahkamah Konstitusi,jakarta:Sinar Grafika

Jimly Asshiddiqie, 2008, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Jakarta : Konstitusi

Ni'matul Huda, Negara Hukum, Demokrasi, & Judicial Review, Ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2005.

Soimin dan Mashuriyanto, 2013, Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Yogyakarta: UII Press.

### JURNAL

Galuh Candra Purnamasari, “ kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan judicial review terhadap undangundang Ratifikasi perjanjian internasional”, Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 Nomor 1, Oktober 2017.

Basniwati, “ Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”, Jurnal Ius | Vol II Nomor 5 Agustus 2014.

Ahmad Fadlil Sumadi, “Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Teori dan Praktik”, Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 6, Desember 2011.

Nanang Sri Darmadi, “Kedudukan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia” Jurnal Hukum Vol.Xxvi, No.2, Agustus 2011.

Titin Apriani, Kedudukan Hakim Ad-Hoc Pada Pengadilan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Fakultas Hukum Unmas Denpasar Psdku Mataram, Vol. 13, No. 2, September 2019.

H.Nurdin,Eksistensi Hakim Ad Hoc Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Kekusaan Kehakiman, Universitas Islam Makassar, Meraja Journal, Vol. 2, No. 2, Juni 2019.

## **UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi;

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.